

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN DANA OTONOMI KHUSUS
DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN
KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Jaap Fernando Usyor
NPP. 32.1113

Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.1113@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement: The policy on the use of Special Autonomy Funds is regulated under Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua, which grants the region the authority to govern itself with three main priorities: health, education, and the economy. Education is a top priority as it serves as a foundation for improving the quality of human resources. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Special Autonomy Funds in accelerating educational development in Sorong City, Southwest Papua Province. **Method:** The research uses Duncan's theory of effectiveness as cited in Yoga (2019). A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants included the Acting Head of the Department of Education and Culture of Sorong City, the Head of Primary and Junior High School Development, and the Head of Financial Planning and Asset Management Division. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing with verification. **Result:** The results show that the effectiveness of the Special Autonomy Funds in accelerating educational development is still suboptimal. While assistance in the form of school supplies, uniforms, and facilities has been provided to students in need, regulatory issues and limited public understanding continue to hinder policy implementation. **Conclusion:** The implementation of Special Autonomy Funds in the education sector in Sorong City has made progress, particularly through budget adjustments aligned with local needs. Strategies include infrastructure development, teacher quality improvement, curriculum adjustment, and scholarship provision. Success is supported by institutional synergy, clear funding mechanisms, and inter-agency communication. However, low community participation and complex administrative procedures remain challenges. A community-based approach and active public involvement are key to enhancing policy effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Special Autonomy Fund, Accelerated Development, Education

ABSTRAK

Permasalahan: Kebijakan tentang penggunaan dana otonomi khusus sudah tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur tentang Otonomi Khusus Papua yang dimana mengatur daerahnya sendiri dan mempunyai tiga prioritas penting yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pendidikan menjadi hal yang menjadi prioritas penting karena merupakan hal dasar untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan dana otonomi khusus dalam proses percepatan pembangunan bidang pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. **Metode:** Teori yang digunakan ialah teori efektivitas menurut Duncan dalam Yoga (2019). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan untuk penelitian ini yaitu Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan dana otonomi khusus dalam upaya percepatan bidang pendidikan dapat dikatakan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian bantuan kebutuhan siswa dalam bentuk buku seragam maupun fasilitas sekolah yang benar-benar membutuhkan di Kota Sorong. Masih ada reglulasi dan pemahaman masyarakat yang menjadi faktor penghambat kebijakan Dana Otonomi Khusus di Kota Sorong. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana otonomi khusus bidang pendidikan di Kota Sorong mengalami kemajuan, terutama melalui penyesuaian anggaran dengan kebutuhan lokal. Strategi yang diterapkan meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, penyesuaian kurikulum, dan pemberian beasiswa. Keberhasilan ini ditopang oleh sinergi kelembagaan, kejelasan pendanaan, dan komunikasi antarinstansi. Meski demikian, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan rumitnya prosedur administrasi masih perlu diatasi. Pendekatan berbasis komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan.

Kata kunci: Efektivitas, Dana Otonomi Khusus, Percepatan Pembangunan, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Khusus (Otsus) merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu, dalam hal ini Provinsi Papua, untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara lebih mandiri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan menjamin keadilan serta kesetaraan bagi kelompok yang selama ini termarginalkan, termasuk dalam sektor pendidikan (Marrit, 2018; Asnawi et al., 2021). Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan Otsus menekankan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) melalui peran aktif dalam pengambilan kebijakan daerah, pelestarian budaya, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Papua. Secara yuridis, Otsus Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001, yang menegaskan alokasi dana Otsus, di antaranya minimal 30% untuk sektor pendidikan (Pasal 36 Ayat 2). Otsus juga mewajibkan adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) untuk mengatur pengelolaan dana secara spesifik. Dalam konteks ini, sektor pendidikan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat pembangunan rendah. Namun, realitas implementasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dengan kondisi faktual. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa IPM Papua Barat Daya hanya mencapai angka 68,63, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 75,02. Bahkan, 17 dari 30 kabupaten/kota di Provinsi Papua masih berada dalam kategori IPM rendah. Selain itu, laporan dari LSM Belantara Papua menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% dana Otsus yang benar-benar dialokasikan untuk pendidikan di Kota Sorong, jauh dari ketentuan 30% sebagaimana diamanatkan UU. Minimnya dampak positif kebijakan Otsus terhadap peningkatan kualitas pendidikan mengindikasikan adanya persoalan pada aspek implementasi kebijakan, termasuk lemahnya tata kelola anggaran, rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan, dan kekurangan tenaga pendidik. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan di Papua masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Dalam konteks ini, gagasan *policy design* yang efektif menjadi sangat krusial. Kuratko (2005) menekankan bahwa pendidikan kewirausahaan di abad ke-21 tidak hanya bertumpu pada kurikulum formal, tetapi juga pada inovasi strategi pembelajaran yang adaptif terhadap tantangan sosial dan ekonomi. Perspektif ini relevan untuk mendorong pendekatan baru dalam pendidikan Papua agar lebih kontekstual dan memberdayakan. Di sisi lain, Gylfason (2001) menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam sering kali mengurangi perhatian terhadap investasi di sektor pendidikan. Temuan ini sejalan dengan kondisi Papua, di mana dana Otsus yang besar justru belum mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, Avalos (2011) menggarisbawahi pentingnya pengembangan profesional guru sebagai faktor kunci dalam reformasi pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di Papua dapat dikaitkan dengan kurangnya program peningkatan kapasitas guru yang berkelanjutan. Trede et al. (2012) juga menegaskan bahwa pembentukan identitas profesional, termasuk bagi pendidik, perlu didukung oleh pembelajaran yang bermakna dan reflektif, yang dalam banyak kasus di Papua masih jauh dari ideal. Situasi ini diperburuk dengan kurangnya integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berbasis kebutuhan lokal. Barth et al. (2007) dan Lozano et al. (2015) menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan memerlukan komitmen kelembagaan dan integrasi antara kebijakan, kurikulum, serta sistem evaluasi. Dalam konteks Papua, lemahnya kelembagaan daerah dalam merancang dan melaksanakan Perdapus pendidikan menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian Burger (2010) juga menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan dasar, terutama pendidikan anak usia

dini, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kognitif anak, terutama dari kelompok marjinal. Dalam konteks Papua, intervensi pendidikan semacam ini sangat dibutuhkan mengingat banyak anak usia sekolah berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Kegagalan Otsus dalam meningkatkan sektor pendidikan juga mencerminkan bahwa aspek perencanaan belum berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, tetapi lebih condong pada kepentingan politik dan elite birokrasi. Dengan demikian, pendekatan kebijakan publik yang mengedepankan *stakeholder engagement, governance capacity*, serta evaluasi yang akuntabel menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan dana Otsus benar-benar mendukung transformasi pendidikan Papua. Evaluasi yang menyeluruh atas implementasi kebijakan Otsus di bidang pendidikan tidak hanya bertujuan untuk melihat efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan sumber daya manusia Papua dapat berjalan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah dirancang sebagai bentuk afirmasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara perumusan kebijakan dengan implementasinya, khususnya dalam sektor pendidikan. Secara normatif, Otsus telah mengatur alokasi dana pendidikan minimal 30% dari total dana Otsus (Pasal 36 Ayat 2 UU No. 2 Tahun 2021). Namun, berdasarkan data dari Kota Sorong, hanya sekitar 2% dana Otsus yang benar-benar tersalurkan untuk pendidikan, yang secara jelas memperlihatkan disparitas antara ketentuan yuridis dan praktik di lapangan.

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kelemahan pada desain dan tata kelola kebijakan pendidikan di wilayah Otsus. Jika dilihat dari perspektif *policy design* yang efektif seperti yang dikemukakan Kuratko (2005), maka sistem pendidikan seharusnya mampu beradaptasi dengan konteks lokal dan memberdayakan masyarakat. Namun, desain kebijakan pendidikan di Papua justru masih bersifat top-down dan belum mencerminkan kebutuhan lokal masyarakat OAP. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelibatan komunitas lokal, tenaga pendidik, dan tokoh adat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan Gylfason (2001), ketergantungan terhadap sumber daya alam cenderung menurunkan perhatian pemerintah daerah terhadap investasi jangka panjang di sektor pendidikan. Fenomena ini tampak nyata di Papua, di mana besarnya dana Otsus justru lebih banyak dialokasikan untuk sektor infrastruktur dan belanja rutin birokrasi, bukan untuk pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dari sisi tenaga pendidik, Avalos (2011) menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan profesional guru. Namun, di Papua, program penguatan kapasitas guru masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Hal ini juga berdampak pada rendahnya mutu proses belajar-mengajar dan rendahnya capaian akademik siswa OAP. Kesenjangan identitas profesional guru di Papua pun masih menjadi persoalan mendasar, seperti yang diuraikan oleh Trede et al. (2012), yang menekankan pentingnya refleksi dan pembelajaran berkelanjutan dalam membentuk pendidik yang adaptif dan tangguh. Sayangnya, sistem pendidikan di Papua belum menyediakan ruang yang cukup bagi penguatan identitas profesional guru lokal, terutama dalam konteks pendidikan multikultural dan berbasis adat. Dari sisi sistem dan kelembagaan, Barth et al. (2007) dan Lozano et al. (2015) menekankan pentingnya komitmen institusi terhadap keberlanjutan pendidikan. Di Papua, lemahnya pengawasan dan tidak konsistennya implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) menjadi salah satu akar masalah dalam tidak optimalnya pemanfaatan dana pendidikan. Ketiadaan sistem evaluasi berbasis dampak membuat alokasi anggaran kerap tidak sesuai dengan urgensi dan kebutuhan di lapangan. Selain itu, seperti diungkapkan Burger (2010), intervensi

pendidikan pada usia dini sangat krusial untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak dari kelompok miskin. Namun, Papua masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), yang menyebabkan anak-anak OAP mengalami keterlambatan akses pendidikan sejak usia dini, berpengaruh pada IPM yang stagnan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan besar antara semangat normatif kebijakan Otsus dengan kenyataan implementatifnya di bidang pendidikan. Kesenjangan ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis seperti anggaran dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh persoalan struktural yang lebih dalam, seperti minimnya orientasi kebijakan terhadap kebutuhan kontekstual masyarakat Papua, lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, dan kurangnya akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya berkontribusi terhadap stagnasi kualitas pendidikan di Papua. Kajian ini juga bertujuan untuk menemukan alternatif strategi implementasi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan agar kebijakan Otsus dapat benar-benar mendorong transformasi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks evaluasi penyelenggaraan dana otonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan alokasi dana khusus (DAK) di bidang pendidikan, Pambudi (2021) menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dengan metode berbasis teknologi seperti Intelligence Media Management (IMM) untuk memantau sentimen publik serta kendala di lapangan, khususnya selama masa pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi optimalisasi penggunaan dana tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi faktor krusial untuk perbaikan ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, prinsip kolaborasi dalam penelitian pendidikan yang diuraikan oleh Penuel et al. (2020) memberikan dasar penting untuk membangun kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas program. Pendekatan kolaboratif yang menekankan partisipasi aktif para pemangku kepentingan menjadi kunci agar hasil kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan berdampak positif terhadap praktik pendidikan di lapangan. Selain itu, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan, khususnya melalui model TPACK dan pemanfaatan Spatial Data Infrastructures untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (Álvarez-Otero & De Lázaro y Torres, 2018), dapat menjadi model inovatif dalam pengelolaan dana yang diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan. Ini penting mengingat salah satu tujuan dana otonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Namun, seperti diungkapkan Geib et al. (2011), tantangan regulasi dan infrastruktur dalam konteks pendidikan khususnya bagi kelompok rentan seperti pemuda di lembaga pemasyarakatan, memberikan gambaran bahwa efektivitas penyelenggaraan dana harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung dan pembangunan infrastruktur yang memadai agar program berjalan optimal. Sementara itu, Caena & Redecker (2019) menekankan bahwa pengembangan kompetensi guru melalui kerangka kerja digital yang sesuai dengan tantangan abad ke-21 adalah fondasi penting dalam pemanfaatan dana pendidikan secara efektif. Penguatan kompetensi ini tidak hanya berfungsi pada tingkat individu guru, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam pengembangan kapasitas institusi pendidikan. Faktor motivasi guru dan kepemimpinan sekolah juga memiliki peranan sentral dalam peningkatan praktik pembelajaran (Thoonen et al., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dana otonomi harus melibatkan aspek peningkatan kapasitas SDM dan kepemimpinan yang dapat mendorong motivasi serta keterlibatan aktif guru dalam memanfaatkan dana tersebut secara maksimal. Stevenson (2007) mengingatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks pendidikan berkelanjutan dan lingkungan. Kesenjangan ini

menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh pengelola dana agar hasil pemanfaatan dana otonomi dapat menjawab kebutuhan nyata dan konteks lokal secara tepat. Dalam hal pengelolaan sekolah secara menyeluruh, Hopkins et al. (2014) menguraikan lima fase penting dalam upaya perbaikan dan pengembangan sistem sekolah yang efektif, mulai dari pemahaman budaya organisasi hingga peningkatan kapasitas sistemik. Model ini dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana otonomi dalam penguatan tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Penelitian Thoonen et al. (2012) menegaskan pentingnya praktik kepemimpinan yang efektif serta kondisi organisasi sekolah yang kondusif untuk membangun kapasitas sekolah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, dana otonomi harus diarahkan tidak hanya pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia dan manajemen sekolah yang profesional. Akhirnya, Ramísio et al. (2019) menyoroti pentingnya strategi keberlanjutan dalam institusi pendidikan tinggi, yang mencakup pendekatan bottom-up dan top-down, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam budaya organisasi. Pendekatan holistik ini sangat relevan untuk diterapkan pada pengelolaan dana otonomi agar mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan integratif di sektor pendidikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang masih perlu untuk dikaji lebih dalam terkait efektivitas penyelenggaraan dana otonomi daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik selama masa pandemi maupun di masa normal. Pertama, penelitian oleh Pambudi (2021) menyoroti implementasi DAK Pendidikan selama pandemi COVID-19 dengan fokus pada evaluasi berbasis big data dan media intelijen. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek sentimen publik dan hambatan teknis pelaksanaan, sedangkan efektivitas penyelenggaraan dana dari perspektif tata kelola internal dan mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah belum banyak dibahas secara komprehensif. Kedua, beberapa studi terkait pengembangan kapasitas pendidikan, kolaborasi penelitian, dan penguatan kompetensi guru (seperti yang diungkapkan oleh Penuel et al., 2020; Caena & Redecker, 2019; Thoonen et al., 2011 & 2012; Hopkins et al., 2014) lebih banyak menyoroti aspek peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas organisasi pendidikan. Padahal, hubungan langsung antara kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola dana otonomi dan dampaknya terhadap hasil program pembangunan pendidikan masih belum mendapat perhatian yang memadai. Ketiga, walaupun penelitian tentang pendidikan berkelanjutan dan penerapan strategi keberlanjutan di institusi pendidikan tinggi (Álvarez-Otero & De Lázaro y Torres, 2018; Ramísio et al., 2019; Stevenson, 2007) memberikan gambaran bagaimana pendidikan dapat dijadikan alat transformasi berkelanjutan, studi-studi tersebut belum menyentuh pada bagaimana penyelenggaraan dana otonomi daerah bisa diintegrasikan dengan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks keterbatasan sumber daya dan tantangan teknis. Keempat, penelitian yang membahas pendidikan khusus seperti pada populasi anak berhadapan dengan hukum (Geib et al., 2011) lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan pengembangan infrastruktur pendidikan untuk kelompok khusus. Ini membuka peluang untuk melihat bagaimana dana otonomi daerah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok sasaran yang beragam. Secara keseluruhan, kesenjangan utama yang ditemukan adalah kurangnya kajian yang secara holistik mengaitkan aspek pengelolaan dana otonomi daerah dengan capaian pembangunan daerah, terutama dalam konteks efektivitas tata kelola, mekanisme evaluasi, serta peran kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan hasil program pembangunan. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji efektivitas penyelenggaraan dana otonomi daerah yang mengintegrasikan analisis pengelolaan dana, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta dampak nyata terhadap pembangunan sektor pendidikan di daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam sektor pendidikan di Kota Sorong.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Yoga (2019) yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan berfokus pada sejauh mana program dana otonomi berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dimensi integrasi menilai kelancaran proses pelaksanaan serta penerapan dana yang terkoordinasi dengan baik. Sedangkan dimensi adaptasi mengukur kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan meningkatkan efektivitas serta sarana prasarana pendukung. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif, tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan kemampuan penyesuaian, yang sangat relevan dalam menilai efektivitas penyelenggaraan dana otonomi di daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya, mengingat realitas sosial yang kompleks tidak selalu dapat diukur hanya dengan data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer, yaitu wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan sumber akademis yang relevan (Simangunsong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Informan penelitian terdiri dari Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, serta Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dan pengetahuan mendalam terkait penyelenggaraan dan pengelolaan dana otonomi di sektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Sorong. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Pemilihan sebagai informan kunci didasarkan pada posisinya yang paling strategis dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, dan koordinasi program yang terkait dengan dana otonomi. Informan kunci ini memiliki akses informasi yang paling luas dan komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi efektivitas penyelenggaraan dana otonomi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Hal ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh data yang valid dan mendalam dalam menganalisis efektivitas program tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Dalam Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan

Berdasarkan teori Duncan dalam Machfiroh yang menentukan efektivitas penyelenggaraan dana otonomi khusus dalam percepatan pembangunan bidang Pendidikan terdapat tiga dimensi yaitu Pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Capaian tujuan merupakan hasil akhir yang diharapkan dari serangkaian proses kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penyelenggaraan dana otonomi khusus (Otsus) di Kota Sorong diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, yakni agar pelaksanaan dana Otsus untuk sektor pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Efektivitas penyelenggaraan dana Otsus akan tampak ketika dana tersebut benar-benar digunakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, sesuai dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pendidikan daerah. Dengan kata lain, pencapaian tujuan bukan hanya diukur dari tersalurkannya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program pendidikan yang didanai mampu memberikan dampak konkret terhadap kualitas dan akses pendidikan masyarakat.

a. Proses Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan Sesuai Tujuan/Sasaran Objek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1, disebutkan bahwa dana Otsus untuk setiap kabupaten/kota harus dialokasikan minimal 30% untuk pembiayaan di bidang pendidikan. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi program pemberantasan buta aksara, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini menegaskan bahwa arah dan fokus pembangunan pendidikan telah diatur secara sistematis melalui kebijakan daerah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Otsus.

Tabel 1. Realisasi anggaran sektor pendidikan di Kota Sorong

Tahun	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
2023	33.493.822.293	Otonomi Khusus
2024	37.329.376.553	Otonomi Khusus
2025	25.729.648.700	Otonomi Khusus

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa alokasi dana Otsus untuk bidang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Namun pada tahun 2025, dana tersebut mengalami penurunan. Penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya komitmen, melainkan karena sebagian dana pendidikan dialihkan ke program prioritas lain yang dianggap mendesak, tanpa menghambat jalannya program strategis pendidikan. Penurunan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bersifat adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Walau terjadi penurunan, indikator efektivitas tetap dapat dinilai positif apabila implementasi kegiatan di lapangan menunjukkan keberhasilan, seperti peningkatan jumlah siswa yang mengakses pendidikan dasar dan menengah, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan utama percepatan pembangunan bidang pendidikan masih tetap tercapai melalui strategi pemanfaatan dana yang selektif dan efisien.

b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Pencapaian Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan yang efektif tentu memerlukan dasar hukum yang kuat agar pelaksanaan program dan alokasi anggaran memiliki kepastian hukum dan arah yang jelas. Dalam konteks dana Otsus, beberapa regulasi menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, yaitu:

- 1) **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua**, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber

daya, termasuk bidang pendidikan, sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Papua.

- 2) **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang menjadi acuan umum penyelenggaraan pendidikan nasional dan memberikan prinsip-prinsip dasar tentang pemerataan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan.
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua**, yang memberikan penjabaran teknis mengenai pemanfaatan dana Otsus, termasuk dalam sektor pendidikan, dan menegaskan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana utama program-program tersebut.

2. **Integritas**

Integritas merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam konteks ini, integritas dimaknai sebagai kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Integritas bukan hanya menyangkut individu, melainkan juga melekat pada kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam percepatan pembangunan pendidikan di Papua, termasuk di Kota Sorong, integritas menjadi landasan utama agar dana Otsus benar-benar memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, terutama masyarakat asli Papua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sekaligus meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang masih tergolong kurang mampu. Dengan adanya integritas, maka seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana akan dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

a. Penerapan Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Dalam Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan Berdasarkan Integritas

Penerapan penyelenggaraan dana Otsus dalam pembangunan bidang pendidikan yang berlandaskan integritas harus diwujudkan melalui praktik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, menyampaikan informasi secara terbuka terkait alokasi dan realisasi anggaran dana Otsus. Masyarakat dapat mengetahui ke mana dana tersebut disalurkan, untuk kegiatan apa saja, dan siapa yang menerima manfaatnya. Akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam menunjukkan integritas. Dinas pendidikan harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana Otsus di bidang pendidikan kepada masyarakat, lembaga pengawas, serta pemerintah pusat. Hal ini dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban, audit keuangan, dan pelaporan kinerja program. Dengan begitu, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap program pemerintah dapat meningkat. Integritas juga menuntut komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari pihak internal dinas maupun para mitra kerja seperti penyedia jasa pendidikan, kepala sekolah, dan pengelola program bantuan pendidikan. Masing-masing harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan regulasi dan rencana kerja yang telah disepakati. Keberhasilan penerapan integritas dapat terlihat dari konsistensi pencapaian tujuan utama pendidikan sebagai sektor prioritas, termasuk meningkatnya partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan indeks pembangunan pendidikan daerah. Secara umum, integritas dalam penyelenggaraan dana Otsus di bidang pendidikan di Kota Sorong telah mulai menunjukkan arah positif. Dengan sistem yang lebih tertata dan dukungan pengawasan dari BPK dan inspektorat daerah, efektivitas dana Otsus menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat dan lembaga pendidikan, juga mendorong akuntabilitas yang lebih kuat.

b. Penerapan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Integrasi

Integrasi dalam konteks pengelolaan dana Otsus mencerminkan keterpaduan antara kebijakan, program, pelaksanaan teknis, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam bidang pendidikan, integrasi ini sangat penting agar program yang dijalankan tidak terpisah dari realitas sosial dan budaya masyarakat Papua. Salah satu bentuk integrasi yang nyata adalah pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal. Dengan memanfaatkan dana Otsus, pemerintah daerah mendorong sekolah-sekolah untuk mengadopsi dan mengembangkan kurikulum lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Papua ke dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak hanya memberikan identitas dan rasa bangga bagi siswa Papua terhadap budayanya, tetapi juga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Keberhasilan integrasi kurikulum lokal dapat diukur dari jumlah sekolah yang telah mengimplementasikannya, serta adanya dukungan dari para pemangku kepentingan seperti guru, tokoh adat, dan orang tua siswa. Selain itu, integrasi juga tercermin dalam peningkatan kualitas pengajaran. Penggunaan dana Otsus diarahkan untuk pelatihan guru, pengembangan profesional, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Indikator keberhasilannya antara lain jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan peningkatan skor kompetensi mereka dalam evaluasi kinerja. Hal ini menjadi penting karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada kapasitas tenaga pengajar. Sarana dan prasarana juga tidak bisa diabaikan dalam proses integrasi. Pembangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga penyediaan media pembelajaran berbasis digital merupakan bentuk konkret dukungan infrastruktur untuk mendukung mutu pengajaran. Keberadaan fasilitas yang layak dan memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Lebih jauh lagi, integrasi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program. Pertemuan-pertemuan yang melibatkan stakeholder pendidikan menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi program. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang berbasis dana Otsus tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up, menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian diri terhadap lingkungan maupun terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan yang terjadi. Dalam konteks penyelenggaraan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan, adaptasi menjadi kunci untuk menjaga relevansi antara kebutuhan nyata sekolah-sekolah dengan kebijakan penganggaran yang tersedia. Pendekatan adaptif menuntut pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, untuk mampu menyusun dan menjalankan program-program pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal, tantangan geografis, serta keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan pendekatan adaptif, pemerintah daerah tidak hanya mengikuti ketentuan normatif, tetapi juga secara aktif membaca situasi dan melakukan penyesuaian kebijakan agar tepat sasaran. Dalam hal ini, pelaksanaan dana Otsus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang jumlahnya cukup besar di Kota Sorong. Penyesuaian tersebut mencakup aspek perencanaan program, penyusunan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga monitoring dan evaluasi program pendidikan.

a. Peningkatan Efektivitas Berdasarkan Adaptasi

Strategi peningkatan efektivitas percepatan pembangunan pendidikan berdasarkan pendekatan adaptasi mencakup berbagai aspek utama, seperti pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyusunan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal, serta pemberian beasiswa dan peningkatan akses pendidikan untuk siswa asli Papua. Melalui dana Otsus, alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan aktual dari masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah daerah menyesuaikan jenis dan volume program dengan memperhatikan data jumlah sekolah, siswa, dan guru, serta letak geografis sekolah tersebut. Sebagai contoh, Kota Sorong memiliki

84 Sekolah Dasar (42 negeri dan 42 swasta) serta 40 Sekolah Menengah Pertama (10 negeri dan 30 swasta) yang tersebar di berbagai wilayah. Data ini menjadi dasar adaptasi dalam penyusunan program dan pengalokasian anggaran secara proporsional. Adaptasi juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi siswa melalui program-program pengembangan karakter, pelatihan keterampilan, serta program pembinaan prestasi. Sementara itu, bagi tenaga pendidik, adaptasi diwujudkan melalui pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sekolah masing-masing. Selain itu, pemberian insentif, pengadaan media pembelajaran, serta penyediaan transportasi bagi siswa di daerah terpencil juga menjadi bentuk lain dari respons adaptif pemerintah terhadap tantangan lokal. Seluruh program ini disusun dan dijalankan sesuai regulasi yang berlaku dan merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan adaptif dalam penggunaan dana Otsus telah berjalan dengan baik dan maksimal, karena mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 2. Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sorong

Jenis Sekolah		SD	SMP
Negeri		42	10
Swasta		42	30
Jumlah		84	40

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana berdasarkan Adaptasi

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif agar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lokal. Dalam pelaksanaan dana Otsus, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan pendekatan seragam (one-size-fits-all), karena kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya masyarakat Papua sangat beragam. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan lokal secara menyeluruh, baik melalui survei, dialog dengan masyarakat, maupun masukan dari kepala sekolah dan komite sekolah. Berdasarkan hasil identifikasi, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap dan terencana. Fasilitas pendidikan yang dibangun meliputi ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, toilet, dan ruang guru yang layak. Selain itu, penyediaan alat dan sumber belajar seperti buku, alat peraga, komputer, serta jaringan internet juga menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke sekolah, penyediaan transportasi sekolah bagi daerah terpencil, serta tempat tinggal guru juga menjadi bagian dari strategi adaptif. Hal ini penting agar akses terhadap layanan pendidikan menjadi lebih merata, terutama bagi anak-anak asli Papua yang tinggal di wilayah pinggiran atau perbukitan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana juga merupakan bentuk adaptasi sosial. Masyarakat setempat dilibatkan baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pengawas pelaksanaan proyek pembangunan sekolah. Dengan cara ini, proses pembangunan menjadi lebih inklusif, dan hasilnya lebih sesuai dengan harapan serta kebutuhan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, pendekatan adaptasi dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan telah menjadi bagian integral dari strategi efektivitas penggunaan dana Otsus. Dengan respons yang cepat dan kebijakan yang fleksibel, pemerintah daerah mampu menjawab tantangan teknis dan sosial yang dihadapi dalam penyediaan layanan pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh anak Papua.

3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus dalam Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan

1. Faktor Pendorong

a. Sumber Daya Kebijakan

Salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus di bidang pendidikan adalah tersedianya **sumber daya kebijakan**, terutama dalam bentuk pendanaan. Anggaran yang bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat** serta alokasi khusus dari **dana Otsus** memberikan landasan keuangan yang kuat dalam mendukung program-program strategis di sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan penting, seperti pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum lokal, pelatihan guru, pemberian beasiswa, serta biaya operasional sekolah. Alokasi anggaran tersebut juga digunakan untuk menutup kesenjangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedalaman. Dengan dukungan sumber daya kebijakan yang memadai, pemerintah daerah mampu merancang program yang lebih adaptif dan berpihak kepada masyarakat asli Papua. Keberadaan dana Otsus memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan lokal, tanpa harus terlalu bergantung pada instruksi pusat. Hal ini mendorong efektivitas pembangunan bidang pendidikan dan memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sistem pendidikan secara otonom.

b. Komunikasi Antar-Organisasi

Faktor pendorong lainnya adalah adanya **komunikasi yang efektif antar-organisasi**, terutama antara aparaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pihak-pihak pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Komunikasi yang terjalin dengan baik memungkinkan terwujudnya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pendidikan berbasis dana Otsus. Meski terdapat sedikit ketidaksesuaian pada wilayah yang disebut, seperti Kabupaten Manokwari dalam konteks ini, namun prinsip yang diangkat tetap relevan untuk Kota Sorong. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keterbukaan dan intensitas komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana teknis. Informasi terkait tujuan program, mekanisme pengelolaan dana, serta prosedur pelaporan disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Komunikasi yang baik juga membantu dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekolah, serta memungkinkan respon cepat dari pihak Dinas Pendidikan dalam memberikan solusi. Selain itu, komunikasi yang terbuka menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan.

2. Faktor Penghambat

Meskipun didukung oleh berbagai faktor pendorong, pelaksanaan Dana Otsus dalam bidang pendidikan di Kota Sorong tidak lepas dari hambatan-hambatan yang cukup signifikan. Salah satu faktor penghambat utama adalah **kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua**, khususnya anak-anak dan orang tua dari kalangan keluarga kurang mampu. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti seragam, alat tulis, transportasi, dan biaya hidup anak-anak yang sekolah jauh dari rumah. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana beasiswa dan bantuan pendidikan melalui dana Otsus, namun realisasi dan distribusinya terkadang tidak merata dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, terdapat kendala dalam hal **ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik**. Banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan insentif, sehingga menghambat pemerataan layanan pendidikan. Di beberapa sekolah, terutama di pinggiran kota

dan wilayah perbukitan, kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal karena kekurangan guru, ruang kelas, atau sarana pendukung lainnya. Hambatan lain juga mencakup **kapasitas tata kelola** di tingkat sekolah maupun di Dinas Pendidikan itu sendiri. Lemahnya kemampuan perencanaan, administrasi, dan pengawasan penggunaan dana dapat menimbulkan risiko inefisiensi atau bahkan penyimpangan. Kurangnya pelatihan teknis dalam pengelolaan keuangan berbasis Otsus juga menjadi tantangan bagi sebagian sekolah. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor penghambat ini, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem distribusi bantuan yang lebih akurat dan transparan, meningkatkan insentif bagi guru di daerah tertinggal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dana dan program.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi hambatan

Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, menyadari bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam bidang pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada efektivitas strategi penanganan hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dirancang dan diimplementasikan untuk menjawab tantangan tersebut secara komprehensif. Upaya tersebut mencakup aspek komunikasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, serta perbaikan sistem regulasi dan tata kelola.

a. Meningkatkan Intensitas Sosialisasi Mengenai Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan

Salah satu upaya utama yang diambil adalah peningkatan intensitas sosialisasi mengenai pelaksanaan kebijakan Dana Otsus di bidang pendidikan. Pemerintah memahami bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa asli Papua, dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Sosialisasi yang selama ini terfokus hanya di tingkat pelaksana teknis, seperti sekolah dan perangkat dinas, dinilai belum cukup menyentuh kelompok sasaran utama yakni masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi publik yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, melalui berbagai media dan metode, seperti forum warga, kampanye edukatif di media lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat dan adat dalam menyampaikan informasi. Tujuan dari sosialisasi ini bukan hanya untuk memberi tahu, tetapi juga untuk **membangun kesadaran dan partisipasi aktif** masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pendidikan berbasis Dana Otsus. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme program, maka diharapkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pun akan semakin kuat dan berkelanjutan.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Upaya kedua yang dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kualifikasi tenaga kependidikan, yang merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Pemerintah daerah menyadari bahwa sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga pendidik, memainkan peran sentral dalam menciptakan layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Pemerataan mutu pendidikan di Kota Sorong menjadi fokus utama, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengarahkan kebijakan pelatihan guru melalui program bimbingan teknis, pelatihan kompetensi pedagogik, serta peningkatan kualifikasi akademik, baik secara daring maupun luring. Selain peningkatan kapasitas individu guru, diperlukan juga peningkatan dalam hal sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Investasi pada kualitas sumber daya manusia pendidikan akan berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada tujuan utama pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

c. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Prosedur Administrasi

Hambatan lain yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan Dana Otsus adalah kompleksitas prosedur dan lemahnya kepastian hukum dalam proses administrasi dan regulasi pelaksanaan program. Prosedur yang berbelit-belit dan tumpang tindih tidak hanya memperlambat proses pencairan dana, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di lapangan. Untuk itu, Pemerintah Daerah berupaya melakukan perbaikan sistem regulasi melalui penyederhanaan mekanisme administratif, standarisasi prosedur operasional, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Penting juga bagi pemerintah untuk menyosialisasikan setiap perubahan regulasi secara aktif, agar tidak terjadi kebingungan di tingkat pelaksana. Dalam jangka panjang, perbaikan sistem hukum dan administrasi ini akan menciptakan iklim tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memberikan rasa aman bagi seluruh aktor pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dana otonomi khusus di bidang pendidikan di Kota Sorong mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam adaptasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Temuan tersebut selaras dengan Pambudi (2021) yang menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan keterbukaan informasi untuk mendukung optimalisasi penggunaan dana, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Kemampuan adaptasi kebijakan ini juga didukung oleh prinsip kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang diuraikan oleh Penuel et al. (2020), sehingga tercipta sinergi kelembagaan yang efektif dan komunikasi antarorganisasi yang lancar. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam penelitian ini sesuai dengan model inovatif pengintegrasian teknologi pendidikan yang diusulkan oleh Álvarez-Otero & De Lázaro y Torres (2018), serta pentingnya pengembangan kompetensi guru sebagai fondasi efektivitas pemanfaatan dana, sebagaimana disampaikan Caena & Redecker (2019). Selain itu, faktor kepemimpinan dan motivasi guru yang menjadi penunjang utama efektivitas program didukung oleh temuan Thoonen et al. (2011), yang menegaskan peran sentral kepemimpinan sekolah dalam mendorong peningkatan praktik pembelajaran. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa asli Papua, dan kompleksitas regulasi yang memperlambat proses administrasi. Hal ini mencerminkan tantangan yang juga diungkapkan Geib et al. (2011) terkait regulasi dan infrastruktur yang belum memadai, serta kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan seperti diingatkan Stevenson (2007). Hambatan tersebut menegaskan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana disarankan Ramísio et al. (2019), untuk membangun budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan program. Akhirnya, untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan tata kelola pendidikan, model pengembangan sistem sekolah dari Hopkins et al. (2014) dan praktik kepemimpinan efektif menurut Thoonen et al. (2012) dapat dijadikan acuan. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa dana otonomi tidak hanya digunakan untuk sarana fisik, tetapi juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen sekolah secara profesional, yang pada akhirnya mendukung pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kota Sorong.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan dana otonomi khusus di bidang pendidikan di Kota Sorong mengalami kemajuan signifikan, khususnya dalam hal adaptasi anggaran

yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Temuan ini sejalan dengan Pambudi (2021) yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan keterbukaan informasi untuk mendukung optimalisasi penggunaan dana, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Sinergi kelembagaan dan komunikasi efektif antarorganisasi, seperti Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan, menjadi faktor kunci keberhasilan, sesuai dengan prinsip kolaborasi yang diuraikan oleh Penuel et al. (2020). Pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam penelitian ini mendukung temuan Álvarez-Otero & De Lázaro y Torres (2018) tentang pemanfaatan teknologi inovatif untuk pendidikan berkelanjutan, serta penguatan kompetensi guru sebagai fondasi efektivitas penggunaan dana (Caena & Redecker, 2019). Selain itu, peran kepemimpinan sekolah dan motivasi guru yang aktif mendukung peningkatan praktik pembelajaran (Thoonen et al., 2011). Namun, hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat lokal, khususnya orang tua dan tokoh adat asli Papua, serta kompleksitas regulasi yang memperlambat administrasi, mengingatkan pada tantangan regulasi dan infrastruktur yang belum optimal (Geib et al., 2011) dan kesenjangan kebijakan dengan praktik di lapangan (Stevenson, 2007). Dalam konteks ini, penelitian mengungkap pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Keterlibatan ini meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki terhadap program, yang sejalan dengan pendekatan bottom-up dan keterlibatan pemangku kepentingan yang disarankan Ramísio et al. (2019). Topik menarik lain yang muncul adalah kebutuhan kebijakan afirmatif dalam pemerataan kualitas guru, terutama di wilayah pinggiran dan terpencil Kota Sorong. Ketimpangan kompetensi tenaga pendidik berdampak pada mutu pendidikan yang tidak merata dan menjadi isu strategis yang harus diatasi secara sistematis dalam kebijakan Otonomi Khusus selanjutnya. Hal ini mendukung temuan Hopkins et al. (2014) dan Thoonen et al. (2012) yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen sekolah untuk keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi dana otonomi khusus tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran dan pengembangan fisik, tetapi juga sangat bergantung pada penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas guru secara adil, serta kepemimpinan dan manajemen sekolah yang efektif untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kota Sorong.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dana otonomi khusus di bidang pendidikan di Kota Sorong telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal adaptasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Strategi peningkatan efektivitas yang diterapkan meliputi pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum, dan penyediaan beasiswa. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi kelembagaan, kejelasan pendanaan, serta komunikasi yang efektif antarorganisasi terkait. Namun, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa asli Papua, serta kompleksitas prosedur administrasi dan regulasi. Penelitian juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program sebagai faktor pendukung keberhasilan kebijakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain waktu penelitian yang relatif singkat sehingga mungkin belum mampu menggambarkan dinamika jangka panjang dalam penyelenggaraan dana otonomi khusus. Selain itu, jumlah informan yang terbatas dan fokus pada satu daerah saja (Kota Sorong) membatasi generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain. Penelitian juga lebih banyak mengandalkan data kualitatif, sehingga kurang memberikan gambaran kuantitatif yang mendalam mengenai dampak penggunaan dana tersebut. Faktor partisipasi masyarakat yang rendah juga membatasi pengumpulan data dari perspektif komunitas yang lebih luas.

Arah Penelitian Masa Depan (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi longitudinal agar dapat memantau perkembangan dan dampak jangka panjang dari penyelenggaraan dana otonomi khusus. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan metode campuran (*mixed methods*) untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar hasil lebih komprehensif. Penelitian juga sebaiknya melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat dan orang tua siswa, guna mengkaji peran serta mereka dalam keberhasilan program pendidikan. Selain itu, fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan afirmatif dalam pemerataan kualitas guru di wilayah pinggiran dan terpencil menjadi area penting yang perlu digali lebih dalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez-Otero, J., & De Lázaro y Torres, M. L. (2018). Education in sustainable development goals using the spatial data infrastructures and the TPACK model. *Education Sciences*, 8(4), 171. <https://doi.org/10.3390/educsci8040171>
- Asnawi, E. (2021). *Otonomi khusus terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT Gramedia.
- Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10–20. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>
- Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). Developing key competencies for sustainable development in higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 8(4), 416–430. <https://doi.org/10.1108/14676370710823582>
- Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect cognitive development? An international review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds. *Early Childhood Research Quarterly*, 25(2), 140–165. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.11.001>
- Caena, F., & Redecker, C. (2019). Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). *European Journal of Education*, 54(3), 356–369. <https://doi.org/10.1111/ejed.12345>
- Geib, C. F., Chapman, J. F., D'Amaddio, A. H., & Grigorenko, E. L. (2011). The education of juveniles in detention: Policy considerations and infrastructure development. *Learning and Individual Differences*, 21(1), 3–11. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.05.002>
- Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review*, 45(4–6), 847–859. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00127-1](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00127-1)
- Hopkins, D., Stringfield, S., Harris, A., Stoll, L., & Mackay, T. (2014). School and system improvement: A narrative state-of-the-art review. *School Effectiveness and School Improvement*, 25(2), 257–281. <https://doi.org/10.1080/09243453.2014.885452>
- Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(5), 577–597. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00099.x>

- Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., Lambrechts, W., Lukman, R., & Hugé, J. (2015). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: Results from a worldwide survey. *Journal of Cleaner Production*, 108, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pambudi, A. S. (2021). Evaluasi on going dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan dalam masa pandemi Corona Virus Disease-19 berbasis intelligence media management (IMM). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–7. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1792>
- Penuel, W. R., Riedy, R., Barber, M. S., Peurach, D. J., LeBouef, W. A., & Clark, T. (2020). Principles of collaborative education research with stakeholders: Toward requirements for a new research and development infrastructure. *Review of Educational Research*, 90(5), 627–674. <https://doi.org/10.3102/0034654320938126>
- Ramísio, P. J., Pinto, L. M. C., Gouveia, N., Costa, H., & Arezes, D. (2019). Sustainability strategy in higher education institutions: Lessons learned from a nine-year case study. *Journal of Cleaner Production*, 222, 300–309. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.257>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik - legalistik - empirik - inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Stevenson, R. B. (2007). Schooling and environmental/sustainability education: From discourses of policy and practice to discourses of professional learning. *Environmental Education Research*, 13(2), 265–285. <https://doi.org/10.1080/13504620701295650>
- Thoonen, E. E. J., Slegers, P. J. C., Oort, F. J., & Peetsma, T. T. D. (2012). Building school-wide capacity for improvement: The role of leadership, school organizational conditions, and teacher factors. *School Effectiveness and School Improvement*, 23(4), 441–460. <https://doi.org/10.1080/09243453.2012.678867>
- Thoonen, E. E. J., Slegers, P. J. C., Oort, F. J., Peetsma, T. T. D., & Geijsel, F. P. (2011). How to improve teaching practices. *Educational Administration Quarterly*, 47(3), 496–536. <https://doi.org/10.1177/0013161X11400185>
- Trede, F., Macklin, R., & Bridges, D. (2012). Professional identity development: A review of the higher education literature. *Studies in Higher Education*, 37(3), 365–384. <https://doi.org/10.1080/03075079.2010.521237>
- Yoga, A. S. (2019). Efektivitas layanan e-Samsat Riau dalam upaya peningkatan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau (Studi kasus UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/22032>